

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alifian, Mohammad Yusuf. “Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024.
- Anggoro, Dwi Wahyu Aris Setio. “Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.” Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Aryani, Laela. “Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyyah.” Universtitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri, 2020.
- Assiddiq, Mahfuz, St. Halimang, dan Asni. “Mahkamah Mazalim dan Relevansinya terhadap Lembaga Ombudsman Modern: Tinjauan HistorisKomparatif.” *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* (2025): 389–390.
- Bank, World. *Development in Practice Governance The World Bank’s Experience*. Washington DC: World Bank Publication, 1994.
- Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, Welson Yappi Rompas. *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin*

Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, 2016.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741>.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslaatan Umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Fajrin, Auriel Nadifiah. “Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Publik.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Fakhrurrahman. “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 58.

Friana, Hendra. “Menristekdikti Disebut Maladministrasi Plagiarisme Rektor.” Last modified 2017. https://tirto.id/menristekdikti-disebut-maladministrasi-plagiarisme-rektor-cs7g#google_vignette.

Haryati, Eny, Mia Rosmiati, Amirul Mustofa, John Chaidir, Nico D Djajasinga, Lisdawati Muda, Litafira Syahadiyanti, I Wayan Gede Suacana, dan AntonIus Rino Vanchapo. *Pengantar Pelayanan Publik*. Batam: Rey Media Grafika, 2024.

Indonesia, Ombudsman Republik. “3 Rekomendasi Lama Diabaikan, Ombudsman Colek Nadiem.” Last modified 2019. Diakses Maret 24, 2026. <https://ombudsman.go.id/news/r/3-rekomendasi-lama-diabaikan-ombudsman-colek-nadiem>.

———. “Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat.” Last modified 2025. Diakses Maret 22, 2026. <https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-meningkat>.

- . *Laporan Tahunan 2017 Awasi tegur Laporkan*, 2018.
- . *Laporan Tahunan 2021 Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian*, 2022.
- . *Laporan Tahunan 2023 Perluas pengawasan pelayanan publik*, 2024.
- . *Laporan Tahunan 2024 Meneguhkan pengawasan, memajukan pencegahan maladministrasi*, 2025.
- . *Laporan Triwulan I 2025 Meningkatkan partisipasi masyarakat demi pelayanan publik lebih baik*, 2026.
- . *Melayani Tanpa Pamrih Mengawasi Tanpa Berpihak*, 2019.
- . “Menkeu Belum Laksanakan Rekomendasi, Ombudsman Sampaikan Laporan Kepada Presiden dan DPR.” Last modified 2023. Diakses Maret 24, 2026. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/menkeu-belum-laksanakan-rekomendasi-ombudsman-sampaikan-laporan-kepada-presiden-dan-dpr>.
- . “Ombudsman RI Dorong Pemkab PALI Jalankan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.” Last modified 2025. Diakses Maret 24, 2026. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-dorong-pemkab-pali-jalankan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap#:~:text=Jakarta> - Ombudsman RI menggelar pertemuan monitoring, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
- . “Ombudsman RI Terima Audiensi Warga Kampung Dadap.” Last modified 2025. Diakses Maret 24, 2026. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-audiensi-warga-kampung-dadap#:~:text=Namun dalam perjalananya%2C warga Kampung,sebagai dasar laporan kepada Ombudsman>.

———. “Rekomendasi Belum Dilaksanakan, Ombudsman RI Sambangi Pemprov Jatim.” Last modified 2024. Diakses Maret 24, 2026. Rekomendasi Belum Dilaksanakan, Ombudsman RI Sambangi Pemprov Jatim.

———. “Terbukti Maladministrasi, Pemkab Raja Ampat Terima Rekomendasi Ombudsman RI.” Last modified 2025. Diakses Maret 24, 2026. <https://ombudsman.go.id/news/r/terbukti-maladministrasi-pemkab-raja-ampat-terima--rekomendasi-ombudsman-ri>.

———. “Terbukti Maladministrasi PPDB Jalur Prestasi, Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi.” Last modified 2025. Diakses Maret 24, 2026. <https://ombudsman.go.id/news/r/terbukti-maladministrasi-ppdb-jalur-prestasi-ombudsman-ri-terbitkan-rekomendasi>.

Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (KKN)*, 1999.

———. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, 2014.

———. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Jakarta, Ombudsman DKI. “Ombudsman Optimis Anies-Sandi Lakukan Perbaikan Menata Tanah Abang.” *Ombudsman Republik Indonesia*. Last modified 2018. Diakses Maret 24, 2026. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-optimis-anies-sandi-lakukan-perbaikan-menata-tanah->

Nurkhatimah, Usman Jafar, dan Muhammad Anis. “Kedudukan dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 2, no. 3 (2021): 593.

Oktaviani, Risqa Tri. “Media Sosial Bantu Ombudsman Mendekat ke Masyarakat.” *Ombudsman Republik Indonesia*. Last modified 2021. Diakses April 5, 2026. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--media-sosial-bantu-ombudsman-mendekat-ke-masyarakat>.

Oktaviayanti, Tiara Ike. “Tinjauan Siyasa Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Pradewo, Bintang. “Rekomendasi Ombudsman Ini yang Dijalankan Anies-Sandi Soal Tanah Abang.” *Jawa Pos*. Last modified 2018. Diakses Maret 24, 2026. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0147277/rekomendasi-ombudsman-ini-yang-dijalankan-aniessandi-soal-tanah-abang>.

Praticia, Sharon. “Sepuluh Rekomendasi Ombudsman Tidak Dijalankan.” Last modified 2019. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/31/sepuluh-rekomendasi-ombudsman-tidak-dijalankan>.

Pratiwi, Cekli Setya, Christina Yulita, Fauzi, dan Shinta Ayu Purnamawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ketua Kamar Pembinaan MA RI, 2016.

Putra, Muslim B. “Mengenal Pelayanan Publik.” *Ombudsman Republik Indonesia*. Last modified 2020. Diakses April 28, 2026. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>.

- Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 68–69.
- Sahadi, Erpan. “Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasa Idariyah.” Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori, aplikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Setiawan, Adam. “Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan* 6, no. 2 (2020): 284–295.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Solihin, Danu Firman, Rusnan, Sarkawi, dan Agung Setiawan. “Pelaksanaan Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025): 196.
- Susilo, Bambang. “Asas Kesamaan dalam Pelayanan Publik di Indonesia.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 9, no. 1 (2024): 67.
- Suyuthi, Pulungan. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, Pemikiran*. Jaka: RajaGrafindo, 2002.
- Taufiq, Muchtar, Doni Martien, dan Ismail. “Analisis Sengketa Tindak Lanjut Rekomendasi Ombudsman oleh Instansi Pemerintah: Pendekatan Hukum

Administrasi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025).

Umam, Muhamad Khoerul. “Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Perspektif Masalah Mursalah.” *jurnal Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024).

Wahidillah, Nur, Shifa Rosa Apriyani, Vanessa Ria Meilani, dan Zahwa Mutia Ashari. “Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer.” *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 6.

Wibowo, Agus, dan Kastubi. “Implementasi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam Pelayanan Publik.” In *Seminar Nasional & Konsorsium Universitas 17 Agustus 1945 Se-Indonesia VI*, 128. Semarang: Fakultas Hukum Univ 17 Agustus Semarang, 2024.

Yusriadi. *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta, 2023.

“Ombudsman Usut Kasus Dugaan Maladministrasi E-KTP.” *Tempo*. Last modified 2018. Diakses Maret 24, 2026. <https://www.tempo.co/politik/ombudsman-usut-dugaan-maladministrasi-kasus-e-ktp-895347>.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, n.d.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, n.d.

*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
n.d.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, n.d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, n.d.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009.